



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN TAHUN 2023 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan dan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kepemudaan perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 – 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
7. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 – 2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
6. Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan adalah koordinasi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan, instansi vertikal dan mitra kerja pembangunan Kepemudaan.
7. Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan yang selanjutnya disebut RAD Pelayanan Kepemudaan adalah rencana aksi Daerah yang berisi program serta kegiatan di bidang Kepemudaan guna mewujudkan sumber daya pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing.

## BAB II RAD PELAYANAN KEPEMUDAAN

### Pasal 2

- (1) RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023-2024 meliputi:
  - a. Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
  - b. domain indeks pembangunan Pemuda, bentuk koordinasi, kode, program, kegiatan, dan rincian output;
  - c. indikator;
  - d. baseline;
  - e. target; dan
  - f. kementerian/lembaga pelaksana.
- (2) RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 3

RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menjadi pedoman dalam pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Daerah untuk Tahun 2023-2024.

BAB III  
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Pemantauan dan Evaluasi

## Pasal 4

- (1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1), Gubernur membentuk Tim Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pemantauan pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Evaluasi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan

## Pasal 5

Indikator pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:

- a. pencapaian indikator pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023-2024;
- b. perkembangan pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023-2024;
- c. informasi terkini;
- d. perubahan kebijakan nasional dan peraturan perundang-undangan;
- e. perubahan tindakan pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023-2024;

- f. hasil yang dicapai dan permasalahan yang dihadapi; dan
- g. faktor lain yang mempengaruhi kegiatan pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023-2024.

## Bagian Kedua Pelaporan

### Pasal 6

- (1) Tim Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023-2024 kepada Gubernur paling sedikit satu kali dalam 1 tahun.
- (2) Gubernur selaku penanggung jawab pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua Tim Koordinasi Nasional penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan.

## BAB IV PENDANAAN

### Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau;
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 6 September 2023  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 6 September 2023

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 48.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



*[Handwritten Signature]*  
SUPARMi

NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
 NOMOR 45 TAHUN 2023  
 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN PROVINSI  
 KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 – 2024

RAD PELAYANAN KEPEMUDAAN TAHUN 2023-2024

DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA /BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2022)	TARGET		OPD/K/L PELAKSANA
KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2023	2024	
	<b>Domain Pendidikan :</b>					
1.01.01.1.05	Program Pengelolaan Pendidikan					
1.01.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - KEGIATAN DUTA PELAJAR SADAR HUKUM - KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN POLRI	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - PEMILIHAN DUTA PELAJAR SADAR HUKUM - SOSIALISASI PERATURAN POLRI	4.300	4.500	4.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kaltim
1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang menerima Biaya Personil Peserta Didik - Beasiswa Kaltim	40.035	40.500	40.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kaltim
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa - Pelatihan Kepemimpinan Pelajar - Latihan Dasar Kepemimpinan - Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) - Olimpiade Sains Nasional (OSN) - Festival lomba seni siswa Nasional (FLS2N) - Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia ((OPSI) - Festival inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia (Fiksi) - Lomba debat bahasa Indonesia (LDBI) - Nasional School Debating Champions ship	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	15.580	32.900	650	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kaltim

	(NSFC) - Kegiatan Penguatan Karakter - Bridging training - Test Bakat Minat Siswa					
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa - Pelatihan Kepemimpinan Pelajar - Latihan Dasar Kepemimpinan - Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) - Olimpiade Sains Nasional (OSN) - Test Bakat Minat Siswa	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1.450	1.450	1.450	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kaltim
02.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Kebudayaan	803	850	900	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kaltim
2.11.08.1.01.	Program penyelenggara pendidikan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tk daerah provinsi					Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim
2.11.08.1.01.01	Angka partisipasi kasar Tim Pembina dan Tim Penilai Sekolah Adiwiyata Provinsi.	Proporsi Tim Pembina dan Tim Penilai Sekolah Adiwiyata Provinsi dalam kelompok usia 16-30 tahun.	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim
2.11.08.1.01.01	Angka partisipasi kasar sekolah pada semua tingkatan sebagai Calon Sekolah Adiwiyata Provinsi.	Rata-rata jumlah warga sekolah yang terlibat dalam Gerakan PBLHS melalui Program Adiwiyata Tingkat Provinsi dalam kelompok usia 16-30 tahun.	480	240	480	Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim
2.11.08.1.01.01	Angka partisipasi kasar sekolah pada semua tingkatan sebagai Calon Sekolah Adiwiyata Nasional/Mandiri.	Rata-rata jumlah warga sekolah yang terlibat dalam Gerakan PBLHS melalui Program Adiwiyata Tingkat Nasional/Mandiri dalam kelompok usia 16-30 tahun.	240	240	240	Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim
2123.007.002.051	Majelis Taklim	Pembinaan SDM Pengurus Majelis Taklim	60	60	60	Kanwil Kementerian Agama Prov. Kaltim



2129.051.001.004	Siswa MA Penerima BOS	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	-	-		Kanwil Kementerian Agama Prov. Kaltim
4422.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Siswa Madrasah Berprestasi Penyelenggaraan lomba-lomba dan Ajang Prestasi Siswa (KSM, AKSIOMA, PPMN,MYRES, MSLA)	25	22		Kanwil Kementerian Agama Prov. Kaltim
4436.PEF	Sosialisasi dan Diseminasi - Sosialisasi dan Diseminasi Pendidikan Karakter dan Kewarganegaraan Pemuda Hindu	Siswa yang mendapat pendidikan karakter dan kewarganegaraan	50	50	50	Kanwil Kementerian Agama Prov. Kaltim
4437.PEF	Sosialisasi dan Diseminasi - Pembinaan Sippa Dhamma Samajja - Pembinaan Moderasi Beragama Bagi Siswa Pendidikan Agama dan Keagamaan Buddha - Pembinaan Wawasan Kebangsaan Bagi Siswa Pendidikan Agama dan Keagamaan Buddha - Pembinaan Literasi Keagamaan Bagi Siswa Pendidikan Agama dan Keagamaan Buddha	Siswa Agama Buddha yang mendapat pendidikan karakter dan Kewarganegaraan -Tingkat SMP dan SMA	211	131	131	Kanwil Kementerian Agama Prov. Kaltim
5620.QDC.001.051	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Pembinaan Agen Moderasi Beragama Bagi Duta KUB	12	-		Kanwil Kementerian Agama Prov. Kaltim
5,620,003,001,052	Kampanye dan Publikasi Kerukunan	Jumlah Tokoh Agama dan Pemuda yang mengikuti Kampanye dan Publikasi Kerukunan	50	100	100	Kanwil Kementerian Agama Prov. Kaltim
	<b>Domain Kesehatan dan Kesejahteraan</b>					
	Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan Dan Keluarga Berencana					

068.DJ.3331	Kegiatan: Pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi					Perwakilan BKKBN Kaltim
3331.085	Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja putri sebagai calon ibu	Kelompok Masyarakat				Perwakilan BKKBN Kaltim
3331.QDD.001	PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	Kelompok Masyarakat	766	515		Perwakilan BKKBN Kaltim
1.06.07	Program Pengolahan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Siswa/Pelajar yang ikut serta dalam kegiatan pelestarian dan pendayagunaan nilai-nilai kepahlawanan, kepertinitsan, dan kejuangan	100	100	100	Dinas Sosial Prov. Kaltim
1.06.07.1.01	Kegiatan Pengolahan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		1	1	1	Dinas Sosial Prov. Kaltim
1.06.07.1.01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		1	1	1	Dinas Sosial Prov. Kaltim
1.06.02.1.02	Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya jumlah Karang Taruna yang berperan aktif dalam pembangunan kesejahtraan Sosial	30	30	50	Dinas Sosial Prov. Kaltim
1.06.02.1.02.02	Kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial		30	30	50	Dinas Sosial Prov. Kaltim
1.06.02.1.02.02.02	Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan provinsi		103	105	105	Dinas Sosial Prov. Kaltim
2.11.08.1.01.01	Angka peran serta masyarakat/perorangan/kelompok sebagai Perintis Lingkungan.	Rata-rata jumlah masyarakat/perorangan/kelompok sebagai Perintis Lingkungan, dalam rentang usia 16-30 tahun.	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim
2.11.08.1.01.01	Angka peran serta masyarakat/perorangan/kelompok sebagai Pengabdian Lingkungan.	Rata-rata jumlah masyarakat/perorangan/kelompok sebagai Pengabdian	0	0	0	Dinas Lingkungan

		Lingkungan, dalam rentang usia 16-30 tahun.				Hidup Prov. Kaltim
2.11.08.1.01.01	Angka peran serta masyarakat/perorangan/kelompok sebagai Penyelamat Lingkungan.	Rata-rata jumlah masyarakat/perorangan/kelompok sebagai Penyelamat Lingkungan, dalam rentang usia 16-30 tahun.	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim
2.11.08.1.01.01	Angka peran serta masyarakat/perorangan/kelompok sebagai Pembina Lingkungan.	Rata-rata jumlah masyarakat/perorangan/kelompok sebagai Pembina Lingkungan, dalam rentang usia 16-30 tahun.	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim
2.11.08.1.01.01	Angka peran serta masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim.	Rata-rata jumlah partisipasi masyarakat/lembaga masyarakat/ dunia usaha dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim, dalam kelompok usia 16-30 tahun.	135	125	150	Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim
	<b>Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja :</b>					
2.17.007	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase tercapainya Target UKM naik Kelas (%)	1	1	-	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UMKM Prov. Kaltim
2.17.008	Program Pengembangan UMKM Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah wira usaha mandiri	1	1	-	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UMKM Prov. Kaltim
2.17.008	Program Pengembangan UMKM_Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UKM Potensial	-	-	40	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,



						UMKM Prov. Kaltim
2.17.005	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian (DAK) Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi dan UKM yang Terlatih (DAK)	660	300	300	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UMKM Prov. Kaltim
3.31.002	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	5	5	6	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UMKM Prov. Kaltim
2.17.005	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku UKM yang Mengikuti pelatihan	300	-		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UMKM Prov. Kaltim
2.17.005	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian (APBD & DAK) Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku UKM yang Mengikuti pelatihan	-	450	450	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UMKM Prov. Kaltim
2.01.2.01.01.16	Peningkatan Kesempatan Kerja					Disnakertrans Prov. Kaltim
2.01.2.01.01.16.05	Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah pencari kerja yang dilatih berwirausaha				Disnakertrans Prov. Kaltim
2.07.04	Penempatan Tenaga Kerja					Disnakertrans Prov. Kaltim
2.07.04.1.04.04	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penmpatan) di Daerah Provinsi	Jumlah Tenaga Kerja yang Dapat Berwirausaha				Disnakertrans Prov. Kaltim
2.07.04	Penempatan Tenaga Kerja					Disnakertrans Prov. Kaltim
2.07.04.1.04.04	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penmpatan) di Daerah Provinsi	Jumlah Daerah yang Mendapatkan Kesempatan Kerja melalui : - Pelatihan	120			Disnakertrans Prov. Kaltim

		Kewirausahaan ( 20 Orang X 6 Klmpk = 120 Orang )				
2.07.04	Penempatan Tenaga Kerja					Disnakertrans Prov. Kaltim
2.07.04.1.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja.		96		Disnakertrans Prov. Kaltim
2.07.04	Penempatan Tenaga Kerja					Disnakertrans Prov. Kaltim
2.07.04.1.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja.			200	Disnakertrans Prov. Kaltim
2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur				Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim
2.19.02.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	2.000	10.000	3.500	Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim
3.25.02	Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau - Pulau Kecil	Kelompok Istri Nelayan Masyarakat Pesisir di Kab/Kota				Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kaltim
3.25.02.1.03.01	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau kecil	Melalui Kegiatan pelatihan pengolahan limbah Sampah	50	50	60	
	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil					
3.25.06	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Pelaku Usaha yang diberdayakan melalui Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan				Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kaltim
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar					
	Rincian output :	BIMTEK Pengolahan Bernilai Tambah	40	40	60	
	Menumbuhkan wirausaha-wirausaha kreatif, Inovatif, dan berdaya saing Kab/Kota					



	Meningkatkan Produktifitas, Pendapatan dan Daya Beli Masyarakat Desa pada Kab/Kota					
	Menghasilkan Produk Baru					
	<b>Domain Partisipasi dan Kepemimpinan :</b>					
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan					Kesbangpol Prov. Kaltim
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah peserta sosialisasi pendidikan wawasan kebangsaan bagi pelajar SLTA	10,664	12,187		Kesbangpol Prov. Kaltim
8.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan RO: Meningkatnya wawasan kebangsaan bagi pemuda	Pembauran Kebangsaan Bagi Pelajar SLTA	100	100	100	Kesbangpol Prov. Kaltim
		Penguatan Bela Negara Bagi Pelajar SLTA	100	100		Kesbangpol Prov. Kaltim
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik					Kesbangpol Prov. Kaltim
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik					Kesbangpol Prov. Kaltim
8.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah RO: Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan politik	245	200		Kesbangpol Prov. Kaltim

8.01.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya					Kesbangpol Prov. Kaltim
8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya					Kesbangpol Prov. Kaltim
8.01.05.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah  RO: Meningkatnya pengetahuan tentang cegah dini tentang bahaya Narkotika	Jumlah peserta sosialisasi P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba)			50	Kesbangpol Prov. Kaltim
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial					Kesbangpol Prov. Kaltim
8.01.06.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah RO: Meningkatnya deteksi dini tentang radikalisme dan terorisme	Jumlah peserta FGD peran intelektual muda	80			Kesbangpol Prov. Kaltim
		Jumlah peserta sosialisasi pencegahan dan penanggulangan ekstrimisme	100			Kesbangpol Prov. Kaltim
		Jumlah peserta sosialisasi peran intelektual muda dalam pencegahan radikalisme dan terorisme		69	100	Kesbangpol Prov. Kaltim
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan					Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim
2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur				Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim
2.19.02.1.01 .01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	250	12.370	2.043	Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim

2.19.02.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	234	940	4.032	Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim
2.19.02.1.01.06	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Jumlah Dokumen Penghargaan Pemuda Provinsi yang Berprestasi dan Menerima Penghargaan	12	100	150	Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim
2.19.02.1.01.09	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan dari Seluruh Kabupaten/Kota	0	300		Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim
2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pemuda yang terlibat dalam Organisasi Kepemudaan yang di fasilitasi dalam mengikuti kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi				Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim
2.19.02.1.02.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Jumlah pemuda yang terlibat dalam organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan Daerah Tingkat Provinsi	915	1.000	1.200	Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim
2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan					Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim
2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Pramuka yang Terlibat dalam Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim

2.19.04.1.01 05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan termanfaatkan	1.000	5.000	27.820	Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim
<b>Domain Gender dan Diskriminasi</b>						
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Prov. Kaltim
2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak Dibidang Pemberdayaan Desa Dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Berada Di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Desa Tertinggal Dan Sangat Tertinggal Yang Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tp Pkk, Mha, Kpm, Karang Taruna Dan Pokmas Mampu Berperan Aktif Dalam Pembangunan	30	35	40	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Prov. Kaltim

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
 KEPALA BIRO HUKUM,



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR